

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- B., Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hamilton, Alexander, 1961, *The Federalist Papers*, The New American Library, Amerika.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariwijaya, M., Bisri M. Djaelani, 2008, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1973, *General Theory Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

- Latif, Abdul, dkk, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah konstitusi*, Jakarta, Total media.
- Lotulung, Paulus Efendi, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir, Kuntara Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Nalle, Victor Imanuel W, 2013, *Konsep Uji Materiil*, Setara Press, Malang.
- R., Thalib, A., 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raharjo, Handri 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rogowski, Ralf, Thomas Gawron, 2002, *Constitutional Courts In Comparison The U.S. Supreme Court and the German Federal Constitutional Court*, Berghahn Books, New York.
- Rohmat, Mulyana, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schmitt, Carl, 2008, *Constitutional Theory*, Duke University Press, Durham.

Schwartz, Herman, 2002, *The Struggle For Constitutional Justice in Post Communist Europe*, University of Chicago Press, Chicago.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sumadi, Ahmad Fadlil, 2013, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.

Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi Soedarsono, 2008, *Kontroversi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi, Catatan Hakim Konstitusi Soedarsono*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan MK bersama Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Jakarta.

Vlies, I.C. Van Der, 2005, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Karya Ilmiah

Arfan Faiz Muhlizi, "Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.

Arsyad Sanusi, "Putusan MK Bersifat Erga Omnes", *Majalah Konstitusi*, Nomor 32, 2009.

- Budi Suhariyanto, “Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No 3, Desember 2015.
- E De Wet, 2007, “*The Emerging International Constitutional Order: The Implications Of Hierarchy In International Law For The Coherence And Legitimacy Of International Decision-Making*”, *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 10 No. 2.
- Galih Erlangga, 2015, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pada Mahkamah Agung”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Heikhal A.S. Pane, 2009, “Penerapan *Uitvoerbaar Bijvoorraad* Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- I Gusti Made Agus Mega Putra, Ni Made Yulianti Griadhi, “Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 03, No. 02, Mei 2015.
- Ida Ayu Karina Diantari, 2015, “Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Kasus Pembajakan Kapal Maersk Alabama di Perairan Somalia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar.
- Ihsan Badruni Nasution, 2014, “Pengujian peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) di Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2009)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- International Court of Justice, “Barcelona Traction, Light And Power Company, Limited”, International Court of Justice, Netherlands, 1970.
- Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketataegaraan Republik Indonesia”, *Makalah*, Surakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, “Pengenalannya Mahkamah Konstitusi dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi”, *Makalah*, “Temuwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Jakarta, 7-9 April 2005.

- John E. Ferejohn, “*Constitutional Review in the Global Context*”, *Journal of Legislation & Public Policy*, Vol. 6, Number 1, 2002.
- Larry May, “*Crimes Against Humanity A Normative Account*”, Cambridge University Press, New York, 2005.
- M. Cherif Bassiouni, “*International Crimes: Jus Cogens And Obligation Erga Omnes*”, *Law And Contemporary Problems Journal*, Vol. 59, 1998.
- Moh. Koesno, “Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakman Menurut UUD 1945”, *Varia Peradilan*, Vol. 11, No. 129, Juni 1996.
- Muruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3 Juli 2009.
- Philipus M. Hadjon, “Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi”, *Makalah*, “Acara Temu Ilmiah Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Se-Jawa Timur”, Surabaya, 10 Juli 1993.
- Puteri Hikmawati, “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali”, *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No 01/IP3DI/Januari 2015.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Desember 2013, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan tahun 2003-2012)”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4.
- Yance Arizona, “Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 Nomor 1, November 2008.

Produk Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Kebijakan

SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Internet

Adani, Luthfi, "Putusan Uji UU Pemilu, Konstitusi Memuat Syarat "Domisili di Provinsi"", <http://jimly.com/kegiatan/show/183?page=15> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.

Andi Saputra, "Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA", <http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnyasema?nd771104bcj>, diakses pada 13 September 2016.

Andi Saputra, "Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar", <http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466>, diakses pada 13 September 2016.

Dian Puspita, Koesno,Lucky, “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP”,

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/709/69>
5 diakses tanggal 15 Oktober 2015.

Mahkamah Agung, “Keadaan Perkara Tahun 2013”,
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/keadaan-perkara-ma/keadaan-perkara-ma-th-2013> diakses pada tanggal 29 Maret 2016.

Mahkamah Agung, “Keadaan Perkara Tahun 2014”,
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/keadaan-perkara-ma/keadaan-perkara-ma-th-2014> diakses ada tanggal 29 Maret 2016.

Nurul Adriyana, “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, <http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533>, diakses pada 13 September 2016.